



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI
*TAHUN 2021-2026***



**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Pemerintahan hadir untuk menjawab solusi bagi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem sebuah Negara, esensinya menciptakan pembangunan yang merata keberbagai aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat. Banyak sebab musabab Kegagalan Penyelenggaraan Pemerintah, Negara dan Pembangunan yang baik karena tidak mengindahkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dibuat dengan berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagaimana diatur pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lebih akuntabel karena sudah terpola dan terpadu.

Jakarta, 01 November 2021

KEPALA BADAN,

R E F L I, S H

Pembina

NIP.19690404 199103 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	 10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	 16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	 37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	 46
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	 48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	55
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD	57
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	57

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	58
4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	58
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	61
5.1. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi ..	61
5.2. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	65
6.2. Pendanaan	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	76
7.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	78
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
Gambar 2.2 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Jabatan Tahun 2021	20
Gambar 2.3 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Golongan Tahun 2021	21
Gambar 2.4 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2021	23
Gambar 2.5 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.6 Daftar Nama - nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, per 31 Mei Tahun 2021	27
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin	32
Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin	33
Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	34
Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	35

Tabel 2.11	Daftar Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	36
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	38
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	43
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026	49
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	60
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026	63
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, selama tahun 2021 – 2026	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan prima (*Excellent Service*) dari unit-unit pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana salah satunya mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Rencana Strategis.

Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi Daerah serta tujuan setiap Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan RPJM tahapan keempat dari (RPJP) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025, yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP tersebut yang memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi

rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN Tahun 2021-2026.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Jambi yakni unsur staf yang membantu Gubernur Jambi, memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Terwujudnya Jambi *MANTAP* (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulanyang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada, yang disusun oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, akan dijabarkan kembali setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2026, yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 disamping menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2026, juga menjadi dasar penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, menjadi acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKj) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan daripada masyarakat, *stakeholder* yang terkait dengan pemerintahan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian bidang Pemerintahan

khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.1.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.
- b. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja(Renja) dan RKA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2026, dan menjamin adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG

DAERAH PROVINSI JAMBI

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN

PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 5.2. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan
- 6.2. Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

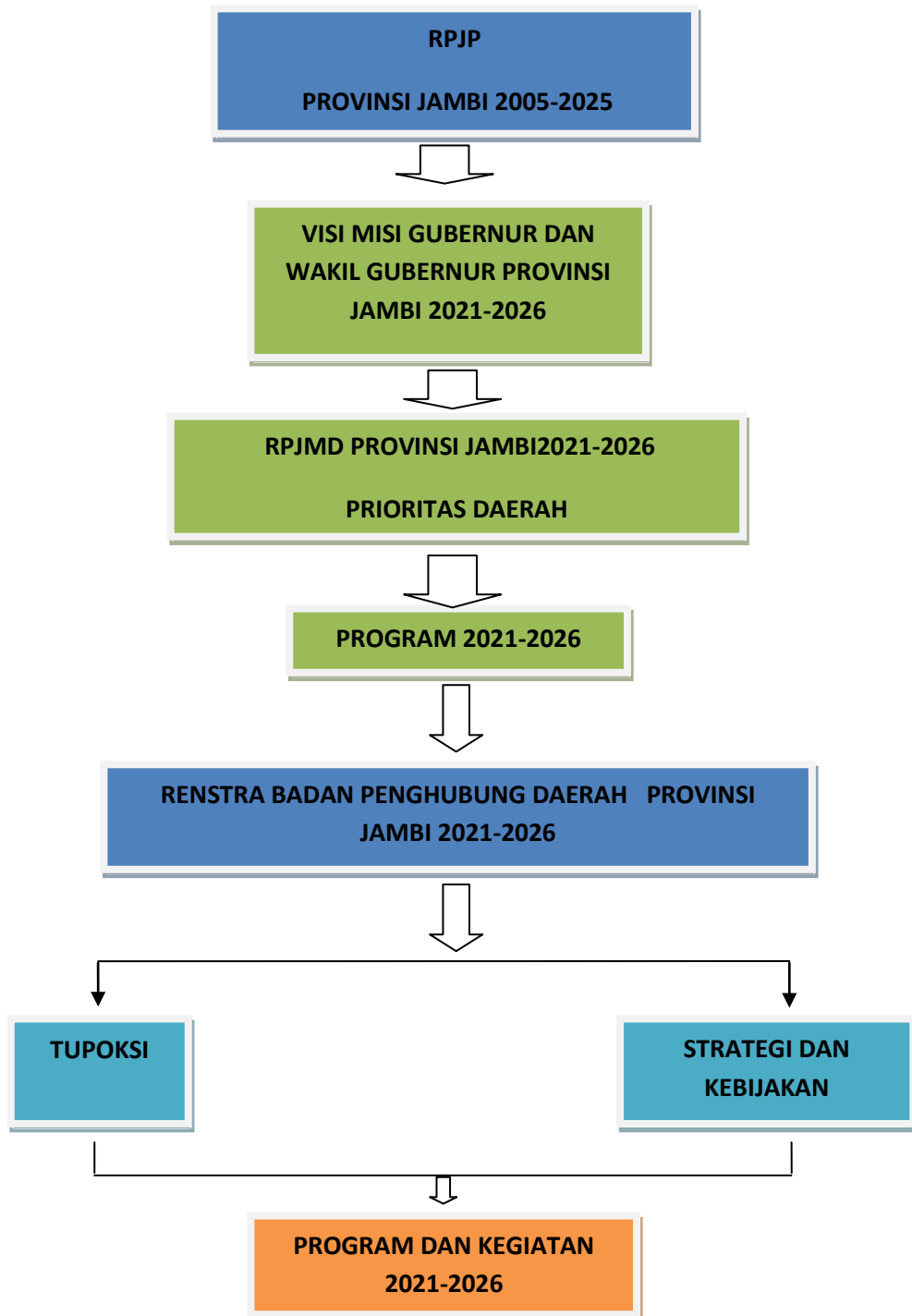
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

BAB VIII PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengikuti Hierarki Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026



Sumber: Bapegda Prov Jambi ,Agustus 2021. Data diolah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Disebutkan pada pasal 2 bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, yaitu:

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta.
- b. Pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi / Luar Daerah.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data atau Informasi.
- d. Pengadaan Kegiatan Promosi, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.
- e. Pengelolaan Anjungan Daerah Jambi di Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersama Sub Bagian Tata Usaha, Subbidang Pengelolaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset, Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi, Informasi dan Seni Budaya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan Administrasi Tata Naskah Dinas, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Pendistribusian Surat Menyurat dan Pengadaan.
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Administrasi Kenaikan Pangkat, Pelatihan, Disiplin Pegawai ASN, Mutasi, Pemberhentian, Gaji Berkala, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pelaksanaan Evaluasi Kehadiran dan Penilaian Kinerja dalam Pemberian Tunjangan.
- d. Pengusulan Penerima Penghargaan, Cuti, Sumpah/Janji, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai ASN;
- e. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.
- f. Pembuatan Database Pegawai Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan Meliputi

Verifikasi, Pembukuan, Perbendaharaan dan Gaji.

- h. Perencanaan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- i. Pengkajian, Perencanaan, Penyusunan dan Pengevaluasi Program Kerja.
- j. Pemantauan dan Pengambilan Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan Penyiapan Bahan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan.
- k. Pelaksanaan dan Penyiapan Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- l. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

3. Sub Bidang Pengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset

Mempunyai tugas mengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bidang Pengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan Pengevaluasi Standar Operasional Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi/Luar Daerah.
- b. Penataan Dan Penginventarisir Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi/Luar Daerah.
- c. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengambil Langkah-langkah Pelaksanaan Pemeliharaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.

- d. Pelaksanaan Urusan Kontrol Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kartu Inventaris Barang.
- e. Pelaksanaan Urusan Promosi Badan Penghubung Daerah Provinsi JambiJambi, Peningkatan Pelayanan Dengan Sistem Pelaporan Penerimaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Sub Bidang Pelayanan Dan Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi, Transportasi, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Provinsi, Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen/Non Departemen, Swasta dan Internasional serta Pembinaan Masyarakat Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah yang berkaitan dengan Bidang Tugas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan Program Kerja Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi Serta Hubungan Antar Lembaga.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi serta Hubungan Antar Lembaga.
- c. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi/Luar Daerah.
- e. Pengurusan, Penyiapan Kelengkapan Administrasi dan Perjalanan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsidan Sekretaris Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Pelaksanaan Koordinasi Mengenai Hubungan Kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional.
- g. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi yang Terkait Dalam Penyediaan Maupun Penerimaan Data dan Informasi Dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- h. Pemberian Bantuan Kepada Para Pejabat Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Hubungan Kerja Dengan Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi / Luar Daerah.
- i. Pengumpulan dan Pengelola Data atau Informasi Tentang Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi / Luar Daerah.
- j. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

5. Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Promosi Dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Kegiatan Promosi dan

Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.

- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi untuk Melakukan Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata di Tingkat Nasional dan Internasional.
- d. Pengkoordinasi Kegiatan Anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah.
- e. Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi, Meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata Baik di Dalam dan di Luar Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Anjungan Jambi.
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Subbag/Subbid masing-masing. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi



Sumber : Bapegda Prov Jambi ,Agustus2021. Data diolah

2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.2.1.Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi didukung Sumber Daya Manusia yang tersebar dalam Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 30 September 2021, tercatat sebanyak 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 46 orang Pejabat Fungsional Umum dan 1 orang Penata Laksana Barang Terampil yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi), serta 41 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Total Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 30 September 2021 tercatat sebanyak 92 orang.

Berdasarkan Bezetting Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil kondisi 31 Desember 2020, proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2021 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 18 orang, dengan nomenklatur jabatan yang dibutuhkan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruang
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
1	JFT Perencana Pertama	1	S1/D4	Bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh kepala LKPP dan mengikuti pendidikan dan pelatihan	III/a

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruang
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
				kedinasan di bidang perencanaan, mendapat sertifikat atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan/ STTPL)	
2	JFT Analisis Kepegawaian Pertama	1	S1/D4	Bidang Ilmu kepegawaian, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan	III/a
3	JFT Pranata Komputer Pertama	1	S1/D4	Sarjana Komputer/ Ilmu Komputer yang relevan dengan tugas dan jabatan yang relevan	III/a
4	JFT Arsiparis Pertama	1	S1/D4	Manajemen/ Kepegawaian/ Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
	Pengelola	2	D3	Bidang Akuntansi/	II/d

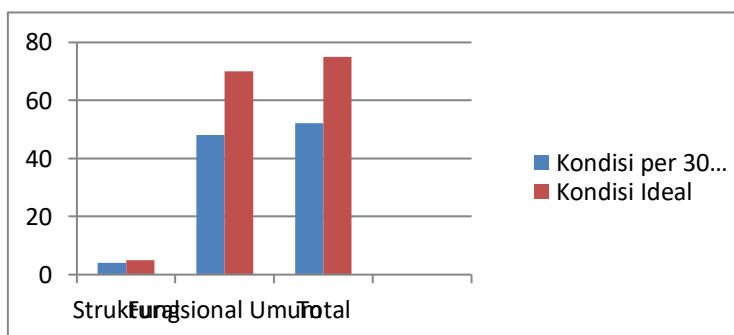
No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruang
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
5	Keuangan			Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	
6	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1/ D2	Manajemen perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
7	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	1	SLTA/D1/ D2	Bidang Listrik atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
8	Petugas Keamanan	6	SLTA/D1/ D2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
9	Pengemudi	2	SLTA/D1/ D2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
10	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	1	D3	Manajemen/Sosial/ Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
	Jumlah	18			

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2020. Data diolah

Dengan demikian idealnya kondisi Sumber Daya Manusia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebanyak 110 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 4 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 61 orang Jabatan Fungsional Umum dan 41 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan Tahun 2021 dapat disajikan pada Grafik Histogram Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2
Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

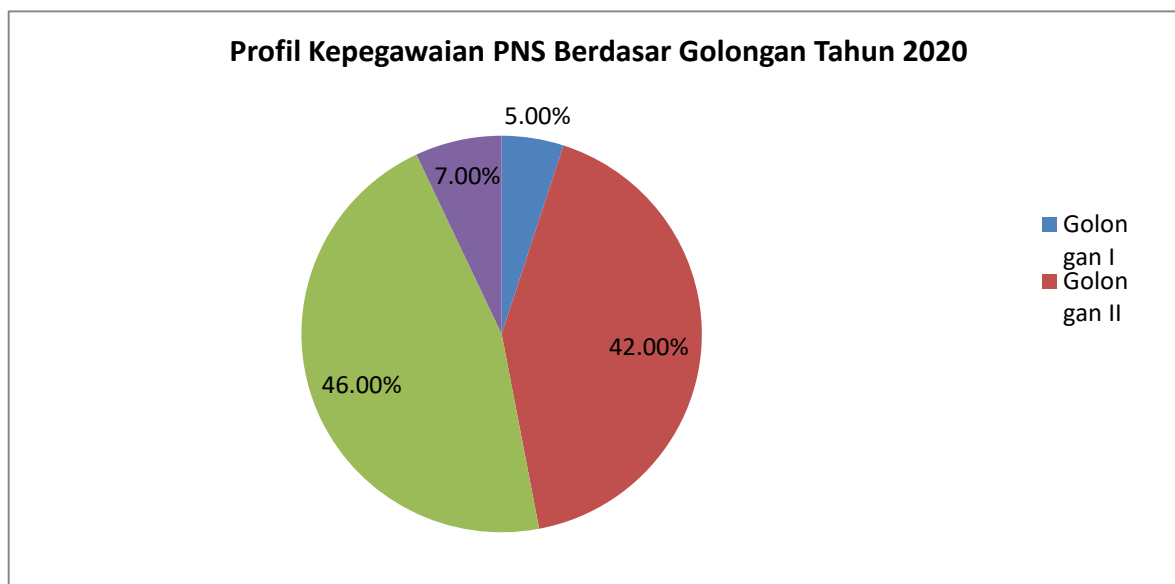


Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 September 2021. Data diolah

Berdasarkan Golongan, 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang atau 7 persen, Golongan III sebanyak 27 orang atau 46 persen, Golongan II sebanyak 19 orang atau 42 persen dan Golongan I sebanyak 1 orang atau 5 persen. Untuk jelasnya Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

berdasar golongan dapat disajikan pada Diagram Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Tahun 2021



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30 September 2021. Data diolah

Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama untuk Jabatan Fungsional Umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal. Pegawai di Badan Penghubung Daerah sebagian besar merupakan pegawai Golongan III yakni sebanyak 27 orang atau 46 persen. Selanjutnya penyebaran jumlah pegawai PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel.2.2

Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Kondisi September Tahun 2021

No.	Golongan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	1	1
2	II	17	2	19
3	III	7	20	27
4	IV	1	3	4
Jumlah		25	26	51

Sumber :Bapegda Prov Jambi,per 30 September 2021.Data diolah

Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 1 orang Eselon IIIa dan 3orang Eselon IVa serta 48 orang Fungsional Umum, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3.

Tabel.2.3

Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

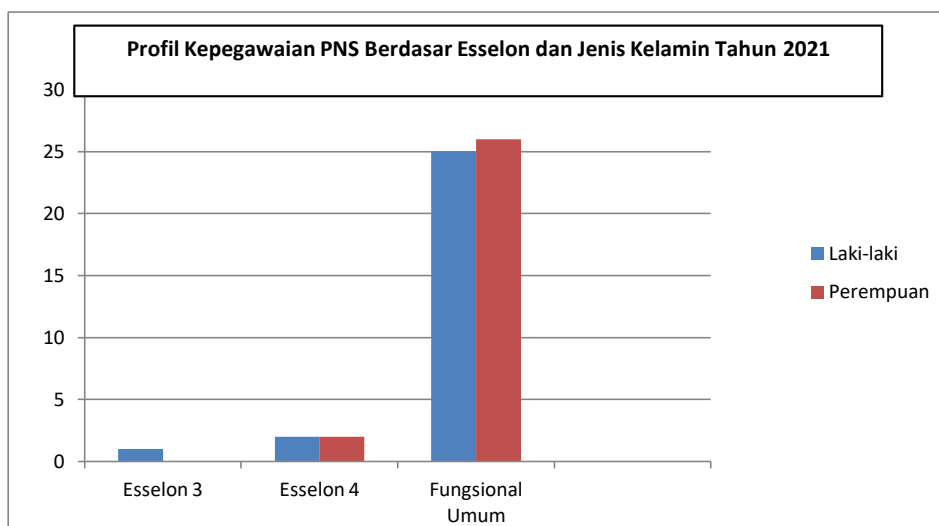
No.	Eselonering	Jumlah Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	III.a	1	-	1
2.	IV.a	2	1	3
3.	Fungsional Umum	22	25	47
Jumlah		25	26	51

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30September2021. Data diolah

Profil Kepegawaian PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4

Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30 September 2021. Data diolah

Dari Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana dari 51 orang jumlah Pegawai terdiri dari Laki-laki 25 orang (49 persen) dan Perempuan 26 orang (51 persen). Sedangkan yang menduduki Jabatan Struktural (Eselon) dari 4 Jabatan Struktural (Eselon) yang tersedia, di duduki 3 orang Laki-laki (60 persen) dan 1 orang Perempuan (40 persen). Demikian juga dengan Jabatan Fungsional Umum, dari 47 Pejabat Fungsional Umum terdiri dari 22 orang Laki-laki (49 persen) dan 25 orang Perempuan (51 persen). Jumlahnya seimbang sesuai dengan kondisi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdistribusi; tamatan SD sebanyak 2 orang, tamatan SLTP sebanyak 4 orang, tamatan SLTA sebanyak 17 orang, tamatan Sarjana Muda (DIII) sebanyak 1 orang, tamatan Sarjana (S1) sebanyak 24 orang dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

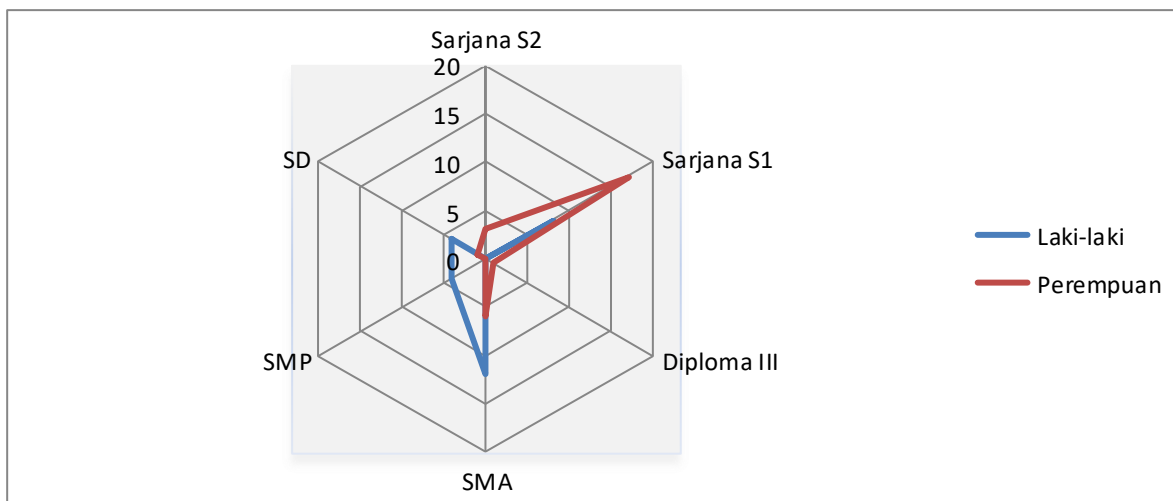
No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca sarjana (S2)	-	3	3
2.	Sarjana (S1)	8	16	23
3.	Sarjana Muda (DIII)	-	1	1
4.	SLTA	12	5	17
5.	SLTP	4	-	4
6.	SD	1	1	2
	Jumlah	25	26	51

Sumber: Bapenda Prov Jambi, per 30 September 2021. Data diolah

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan Pegawai PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, bila dilihat dari pendidikan SLTA ke atas, pegawai Perempuan yang berpendidikan tamatan Sarjana Muda (DIII), Sarjana (S1) dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 20 orang sementara untuk kualifikasi pendidikan yang sama bagi pegawai Laki-laki sebanyak 8 orang.

Selanjutnya Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Juli 2021. Data diolah

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi PNS di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 24 orang (42 persen), dan SMA/SMK sebanyak 17 orang (33,33 persen). Sisanya Pasca Sarjana S2 sebanyak 3 orang (5,26 persen), D3 sebanyak 1 orang (1,75 persen), SMP sebanyak 4 orang (7,02 persen) dan SD sebanyak 2 orang (10,53 persen). Untuk itu perlu peningkatan kualitas pegawai PNS ke depannya.

Selanjutnya berdasarkan Tingkat Usia, jumlah PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari: 51 orang. Usia 31-35 tahun, 2 orang; usia 36-40 tahun, 11 orang; usia 41-45 tahun, 9 orang; usia 46-50 tahun, 8 orang; usia 51-55 tahun, 16 orang; dan usia 56-60 tahun, 5 orang seperti ditunjukkan Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin, Kondisi 30 September 2021

No.	Tingkat Usia (tahun)	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	31 - 35	-	2	2
2	36 - 40	7	4	11
3	41 - 45	4	5	9
4	46 - 50	2	6	8
5	51 - 55	9	7	16
6	56 - 60	3	2	5
T o t a l		25	26	51

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30 September 2021. Data diolah

Untuk jelasnya nama-nama Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada posisi 30 September Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 1 yaitu Daftar Aparatur Sipil Negara Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tanggal 31 Juli Tahun 2021. Sedangkan 41 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) terdiri dari 34 orang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya sebanyak 7 orang berjenis kelamin Perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, per 30 September 2021

NO.	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki -laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluar- kan SK
1.	ANDRI WIDAYANTO	Jakarta, 19-03-1986	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2005	
2.	RITNO	Cilacap, 21-07-1977	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2006	
3.	FERIANTO, ST	Sukoharjo, 15-02-1980	Laki -laki	-	S1	237/Kep.Gub/Phb/Jbi/2007 Tgl.15-06-2007	Gubernur Jambi
4.	SUWARSO	K.Manjangan , 14-12-1964	Laki -laki	-	SLTP	Tgl.01-01-2008	
5.	EPENDI	Jakarta, 23-10-1967	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
6.	SUYADI	Suyadi, 07-05-1969	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.25-03-2008	
7.	AGUNG PRATAMA	Tangerang, 24-05-1990	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
8.	YULI	Jakarta, 15-02-1976	-	Perempua n	SLTP	Tgl.01-04-2010	
9.	JOKO SULISTIYONO	Boyolali, 14-04-1985	Laki -laki	-	SLTA	No.11 Tahun 2008 Tgl.01-01-2009	
10.	DEDI SETIAWAN	Tangerang, 04-06-1983	Laki -laki	-	SLTA	No.02 Tahun 2010 Tgl.01-04-2010	
11.	SATIMO	Wonogiri, 11-07-1965	Laki -laki	-	SLTA	No.13 Tahun 2011 Tgl.01-07-2011	
12.	Rd. SYANGGI PRATAMA RAVITHO	Jambi, 15-07-1985	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2011	

NO.	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki -laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluar- kan SK
13.	SUPRIYANTO	Jakarta, 29-12-1978	Laki -laki	-	D1	No.02 Tahun 2011 Tgl.01-01-2011	
14.	JAJAT SUDRAJAT	Tasikmalaya , 01-08-1980	Laki -laki	-	SLTA	No.02 Tahun 2011 Tgl.18-01-2011	
15.	MARHADI	Tangerang, 16-09-1982	Laki -laki	-	S1	Tgl.01-01-2016	
16.	AMRULLAH	Palembang, 04-08-1977	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-10-2014	
17.	HAROMAINI	Jambi, 24-12-1984	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.02-01-2014	
18.	ELINA DARWANI	Jambi, 23-03-1981	-	Perempua n	S1	Tgl.01-10-2014	
19.	MIRANDA INKO SHERLY	Pati, 20-08-1999	-	Perempua n	SLTA	S/824/212/SPT/BAPEGDAPRO V.I/ IV/2018 Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
20.	AINAYAH KHAERUNNISAI	Sengkang, 28-08-1998	-	Perempua n	SLTA	21/Kep.BAPEGDAPROV.I/ IV/2018 Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
21.	WIDHI SASONGKO JATI	Pekalongan, 26-07-1986	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubun g Daerah Prov.Jambi

NO.	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki -laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluar- kan SK
22.	WAGIMIN	Kebumen, 27-01-1988	Laki -laki	-	SLTA	S/800/64/BAPEGDAPROV.I/ V/2018 Tgl.02-05-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
23.	PUTRI THARA BANOWATI	Jakarta, 13-08-2000	-	Perempua n	SLTA	S2/Kep.BAPEGDAPROV.I/ VII/2018 Tgl.03-07-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
24.	M.BAGAS RIGIATA	Jakarta, 23-10-1980	Laki -laki	-	SLTA	No.824/217/SPT/BAPEGDAP ROV.I/VIII/18 ,Tgl.01-08-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
25.	HARRY SETYAWAN	Jambi, 24-04-1995	Laki -laki	-	S1	S2/Kep.BAPEGDAPROV.I/ Tgl.01-10-2018	Kepala Badan Penghubu ng Daerah Prov.Jambi
26.	SUTARNO	Banjarnegar a, 06-08-1966	Laki -laki	-	SLTP	Tgl. 12-03-2019	
27.	FAISOL HUDAYA	Kudus, 06-09-1975	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 10-06-2019	
28.	AJAT SUDRAJAT		Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 14-06-2019	

NO.	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki -laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluar- kan SK
29.	MUHAMMAD YANTO	Tangerang, 02-08-1995	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 01-10-2019	
30.	SYAMSUDIN INDRANEGARA	Jakarta, 12-05-1981	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 03-10-2019	
31.	FERDIAN SUBAGJA	Jakarta, 10-11-1991	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 01-07-2020	
32.	MUHAMMAD IHSAN SARHAN	Jakarta, 14 Juli 2001	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 01-10-2020	
33.	MUHAMMAD FARHAN S.Ikom	Lubuk Resam, 29-06-1995	Laki -laki	-	S1	Tgl. 01-10-2020	
34.	AZANI	Lempur Tengah, 12 Mei 1973	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 01-10-2020	
35.	TITO BAHARUDDINSY AH	10-06-1998	Laki -laki	-	SLTA	Tgl.01-02-1021	
36.	ARFITA YANI, SE	14-08-1993	-	Perempua n	S1	Tgl. 01-10-2020	
37.	SOPAN SOPIAN	Muara Sabak, 07- 09-1986	Laki -laki	-	SLTP	Tgl. 01-10-2020	
38.	WAGIMAN	27-03-1963	Laki -laki	-	SLTP	Tgl. 01-10-2020	
39.	DEIT TANAMAL	01-01-1979	Laki -laki	-	SLTA	Tgl. 01-05-2021	
40.	RUDI HARTANTO	10-08-1978	Laki- laki	-	SLTA	Tgl. 03-05-2021	

NO.	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki -laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluar- kan SK
41.	IDA FITRIDA SYARI	26-10-1985	-	Perempua n	DIII	Tgl. 01-07-2021	
Jumlah			34	7	S1,SLTA,SL TP dan SD		

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 September 2021. Data diolah

Tabel 2.6. menunjukkan bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiri dari : tamatan SD sebanyak 1 orang, tamatan SLTP sebanyak 5 orang, tamatan SLTA sebanyak 28 orang, tamatan Sarjana Muda (DI / DIII) sebanyak 2 orang, dan tamatan Sarjana (S1) sebanyak 5 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, per 30 September Tahun 2021

No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai Tidak tetap (PTT)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana (S1)	3	2	5
2.	Sarjana Muda (DI / DIII)	1	1	2
3.	SLTA	25	3	28
4.	SLTP	4	1	5
5.	SD	1	-	1
	Jumlah	34	7	41

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30 September Tahun 2021. Data diolah

Selanjutnya jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut.

Tabel 2.8

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin, per 30 September 2021

No.	Tingkat Usia (tahun)	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	16 - 20	1	-	1
2	21 - 25	2	3	5
3	26 - 30	4	1	5
4	31 - 35	6	1	7
5	36 - 40	6	1	7
6	41 - 45	8	1	9
7	46 - 50	2	-	2
8	51 - 55	2	-	2
9	56 - 60	3	-	3
T o t a l		34	7	41

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 30 September Tahun 2021. Data diolah

Tabel 2.8 menunjukkan rentang usia Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari yang paling muda antara 16-20 tahun sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki, dan yang paling tua berusia 56-60 tahun sebanyak 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Sisanya sebanyak 37 orang pada rentang usia produktif 21-55 tahun.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, Monitor, Printer, Keyboard, UPS), alat komunikasi (Telepon, Faksimili, Jaringan Internet dan TV Kabel) perangkat elektronik dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas Pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan lainnya.

Kondisi sarana prasarana di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana saat ini yang ada dan tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9.

Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi , per 31 Desember 2020

No	Jenis/Merk	Jumlah	Kondisi
A	KENDARAN RODA EMPAT	19	Baik
1	Toyota Fortuner	3	Baik
2	Toyota Avanza	2	Baik
3	Isuzu Panther	1	Baik
4	Honda CR-V	1	Baik
5	Honda City	1	Baik
6	Mitsubshi L300	1	Baik
7	Isuzu ELF	1	Baik
8	Toyota HIACE	3	Baik
9	Toyota Kijang Innova	2	Baik
10	Toyota Alphard	2	Baik
11	Honda HR-V	2	Baik
B	KENDARAAN RODA DUA	10	Baik
1	Honda Supra X 125 CW	4	Baik
2	Honda NF125 CRX	4	Baik
3	Suzuki Thunder 125	2	Rusak

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2020. Data Diolah

Selain Kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ada pula peralatan dan teknologi penunjang kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada tabel 2.10.

Tabel 2.10.

Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan
Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer PC	26	Unit	10	5	11
2	Laptop	14	Unit	4	-	10
3	Printer	26	Unit	9	6	11
4	Faximili	1	Unit	-	-	1
5	Meja Kerja	22	Buah	22	-	-
6	Kursi Kerja	42	Buah	37	-	5
7	Lemari Arsip	13	Buah	13	-	-
8	Filling Kabinet	8	Buah	5	3	-
9	Ruang Rapat	5	Ruang	5	-	-
10	Kursi Rapat	219	Buah	171	-	48
11	Brankas	4	Buah	4	-	-
12	AC Standing	4	Unit	4	-	-
13	AC Caseete	9	Unit	9	-	-
14	AC Split	127	Unit	82	-	75
15	TV	122	Unit	52	-	70
16	Telepon	106	Unit	101	-	5
17	Mesin Foto Copy	1	Unit	1	-	-
18	Sofa	51	Buah	46	-	5

Sumber: Bapedgaprov Jambi, per 31 Desember 2020, Data Diolah.

Total aset yang dikelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 senilai

Rp.62.243.645.147,60 (Enam puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh sen), diluar nilai Tanah dan Aset Lainnya, dengan kondisi BAIK. Jelasnya rincian aset ini tertera pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.

Daftar Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi,
per 31 Desember Tahun 2020

No	Jenis Peralatan	Nilai (Rp)	Keterangan / Kondisi
1	Tanah	-	Tercatat di Biro Umum
2	Peralatan dan Mesin	14.544.126.678,60	Baik
3	Gedung dan Bangunan	45.448.362.021,00	Baik
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	384.185.292,00	Baik
6	Aset Lainnya	1.682.561.150	Rusak Berat
	Total	62.243.645.147,60	

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2020. Data Diolah

Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada sasaran sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penerimaan Petribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Jambi TMII.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jambi

(dalam ribuan)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. IKM	75	75	75	80	80	(Data tidak tersedia)	71,211 (B)	75,039 (B)	77,160 (B)	80,354 (B)	-	95%	100,05 %	96%	100,44 %
		2. AKIP	60	60	60	60,5	60,5	-	-	-	-	65,56	-	-	-	-	108,4 %
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta	Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dari Mess Jambi	2.630.000	2.651.300	2.725.464	3.053.080	3.027.980	2.017.925	1.482.400	1.409.000	1.471.450	314.200	77%	56%	52%	48%	41%

3	Meningkatnya Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi	Peningkatan kunjungan wisata ke Anjungan Jambi TMII	7000	7210	7426	7648	7877	6967	7416	6622	13763	2134	99,5%	102,9%	89,2%	180%	27,1%
---	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2021. Data Diolah

**keterangan:*

- 1. Nilai IKM yang terdiri dari 90 unsur pelayanan dinilai dan dikeluarkan oleh Biro Organisasi SETDA Provinsi Jambi Bagian Pelayanan Publik*
- 2. Nilai IKM 62,51 – 81,25 Kategori Baik (B)*
- 3. Nilai AKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Rentang Nilai AKIP > 90,01 – 100 (AA), >80,01 – 90 (A), >70,01 – 80 (BB), >60,01 – 70 (B)*

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berada di Jakarta Pusat, berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Usaha Jasa Umum yang membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Jumlah kamar yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebanyak 41 kamar yang disewakan sebanyak 39 kamar terdiri dari 5 kamar VIP, 34 kamar Standar (kondisi layak sewa) dan 2 kamar VVIP tidak dijual/sewa khusus diperuntukkan untuk Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Perkembangan Pendapatan Daerah Jambi dari Retribusi Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta dari Tahun 2016 s/d 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebelumnya.

Pendapatan retribusi daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasar kode rekening SIMDA Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi diperoleh dari :

1. Retribusi Pemakaian Ruangan terdiri dari :

- 1.1 Sewa Ruang Barak di Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit dengan 5 tempat tidur;
- 1.2 Sewa Aula Bawah Rumah Adat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
- 1.3 Sewa Aula Balai Mufakat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
- 1.4 Sewa Kamar di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kamar;
- 1.5 Sewa Kantin Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Pemerintah Provinsi Jambi di Cikini sebanyak 1 (satu) unit;
- 1.6 Sewa Kantin Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit.

2. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggerahan / Villa, (Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di

Cikini) terdiri dari sewa 5 (lima) kamar VIP dan 34 (tiga puluh empat) kamar standar.

Tabel 2.12 memperlihatkan retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 sampai Tahun 2020 terutama dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tidak mencapai target dan selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 26%, hal ini disebabkan oleh sedikitnya tamu yang menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi dan Anjungan Jambi TMII. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Menurunnya minat PNS untuk menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi JambiJambi.
2. Adanya beberapa kamar dan ruang di Anjungan Jambi TMII yang tidak dapat dijual karena mengalami kerusakan.
3. Tarif Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi yang tidak kompetitif sehingga tamu memilih hotel / penginapan yang sejenis dengan harga yang lebih murah dan fasilitas yang lebih lengkap.

Dan khususnya pada tahun 2020 rasio capaian retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi berada di angka yang paling rendah yakni sebesar 41% hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi *Covid-19* sehingga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Untuk indikator kunjungan wisata Anjungan Jambi TMII dari tahun 2016-2019 pada umumnya meningkat dan mencapai target. Bahkan pada tahun 2019 jumlah tamu melebihi target sebesar 180%. Tetapi pada tahun 2020, jumlah tamu yang berkunjung menurun drastis dengan rasio sebesar 27,1% hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi *Covid-19* di Indonesia dan Dunia.

Disamping itu rata-rata setahun kegiatan promosi seni dan budaya daerah Jambi yang dilaksanakan di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kali, dengan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara sebanyak 7.300 orang per

tahun atau rata-rata 20 orang. Adapun Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

Anggaran Dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (dalam Rp)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9.032.571.000,00	10.116.180.000,00	10.446.000.000,00	13.194.000.000,00	6.925.648.542,55	8.603.051.144,00	9.154.009.636,00	9.873.715.471,39	12.053.854.228,60	6.427.514.558,35	95,24%	90,49%	94,52%	91,36%	92,81%	13,85%	12,12%
Program Pelayanan Administrasi Kantor	5.344.574.950,00	6.570.094.500,00	6.607.729.400,00	7.126.849.572,00	5.093.144.347,55	5.042.422.226,00	5.862.227.682,00	6.158.675.589,39	6.551.370.623,60	4.632.480.953,35	94,35%	89,23%	93,20%	91,93%	90,96%	1%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.053.902.550,00	2.677.867.000,00	2.543.774.500	4.905.751.028	1.574.762.795	1.996.816.118,00	2.426.138.454,00	2.466.656.532,00	4.356.238.705	1.537.833.605	97,22%	90,60%	96,97%	88,80%	97,65%	13%	9%
program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.500.000,00	60.000.000,00	-	-	-	95.378.800,00	57.715.000,00	-	-	-	99,87%	96,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-37%	-39%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	60.000.000	65.000.000,00	-	-	-	57.120.000,00	60.625.000,00	-	0%	0%	95,20%	93,27%	0,00%	8%	6%
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	-	17.800.000	32.800.000,00	-	-	-	9.900.000,00	24.800.000,00	-	0%	0%	55,62%	75,61%	0,00%	84%	151%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0%	0%
Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0%	0%
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	-	-	69.000.000	49.000.000,00	27.004.800,00	-	-	69.000.000,00	49.000.000,00	27.000.000,00	0%	0%	100,00%	100,00%	99,98%	-37%	-37%
Program fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan	1.538.593.500	55.620.000,00	161.965.000	119.581.000,00	54.476.200,00	1.468.434.000	55.620.000,00	160.712.250,00	118.804.000,00	54.005.000,00	95,44%	100,00%	99,23%	99,35%	99,14%	4%	3%
Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-	60.000.000,00	-	-	-	-	59.710.000,00	-	-	-	0%	99,52%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-100%	-100 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	-	692.598.500,00	985.731.100,00	895.018.400,00	176.260.400,00	-	692.598.500,00	951.651.100,00	893.015.900,00	176.195.000,00	0%	100,00%	96,54%	99,78%	99,96%	-16%	-16%

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per September 2021. Data Diolah

Capaian Anggaran APBD Provinsi Jambi yang tersedia untuk Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari Tahun 2016 – 2019 yang terdiri dari 8 program meningkat dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 13,85% dan pada tahun 2020 jumlah anggaran menurun sebesar 47% hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran pada pertengahan tahun 2020 untuk penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Sedangkan realisasi penyerapan anggarannya dari tahun 2016 – 2020 rata-rata menurun sebesar 2,58%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya tamu Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, sangat ditentukan oleh standar pelayanan dan kemampuan manajemen organisasi untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- ❖ Domisili Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang berada di Ibukota DKI Jakarta.
- ❖ Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- ❖ Adanya kerjasama antar Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga non pemerintah.
- ❖ Sistem dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mulai tertata dengan baik.

- ❖ Memiliki budaya daerah yang beragam yang dapat menarik minat masyarakat.
- ❖ Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima.
- ❖ Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang memadai.
- ❖ Tuntutan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat.
- ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi layanan administrasi umum dan keuangan.
- ❖ Kualitas SDM yang belum memadai.
- ❖ Banyaknya hotel dan penginapan sejenis lainnya disekitar Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021-2026 perlu ditingkatkan. Evaluasi ke depan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dengan masalah sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya pelayanan publik, disebabkan oleh :
 - a. Sarana dan Prasarana Mess/Kantor yang masih belum memadai,
 - b. Kurangnya Pelatihan / BIMTEK,
 - c. Tidak mengikuti perkembangan IPTEK.
 - 2) Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi, disebabkan oleh kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
 - 3) Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi, disebabkan oleh:
 - a. Belum adanya regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub dan Kepgub.
 - b. Letak geografis Mess Jambi yang kurang strategis.
 - 4) Masih kurangnya Kegiatan Promosi Budaya Daerah, disebabkan oleh:
 - a. Masih kurangnya pelaksanaan Kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan Provinsi Jambi.
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya.

2. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung, dengan masalah sebagai berikut:

Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, disebabkan oleh faktor belum tersosialisasinya tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dapat dilihat dari Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama ini . Untuk jelasnya Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Daerah	1. Belum optimalnya pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana Mess / Kantor yang masih belum memadai • Kurangnya Pelatihan / BIMTEK • Tidak mengikuti perkembangan IPTEK • Kurang memahami dan menguasai Tupoksi masing-masing ASN

		2. Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
		3. Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub, dan Kepgub. • Letak geografis Mess Jambi yang kurang strategis
		4. Masih kurangnya Kegiatan Promosi Budaya Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan pagelaran seni budaya dan pameran produk unggulan Provinsi Jambi. • Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan seni budaya.

2.	Belum optimalnya tugas dan fungsi badan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersosialisasikannya tugas dan fungsi badan Penghubung kepada Kabupaten Kota.
----	--	---	---

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2020. Data Diolah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi *MANTAP* (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

- Jambi Aman** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa

meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung egovernment yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumber daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sebanyak 14 (empat belas) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan

12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

3.3 Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

3.3.1 Pengertian Renstra

Renstra (Rencana Strategis) ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada.

Oleh karena Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah (OPD) di bawah Pemerintah Provinsi Jambi, maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yakni ;

“Terwujudnya Jambi *MANTAP* (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”

Sedangkan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah Misi kesatu dari 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

“ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”

3.3.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenai kondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program. Faktor penentu keberhasilan disini antara lain :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai komitmen tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta; serta kebijakan otonomi daerah yang didukung pendanaan yang cukup memadai guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menjadi faktor penentu keberhasilan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 akan mampu menjawab atau mengatasi tantangan kondisi eksternal dimana pengawasan dari berbagai elemen masyarakat semakin tinggi dan pola pikir yang semakin kritis.
3. Adanya peluang otonomi daerah dan tata kelola birokrasi dan hubungan kerjasama antar instansi yang semakin baik akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi organisasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD

Telaahan RTRW dan KLHS tidak dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam penyusunan Renstra ini, karena secara administrasi dan fungsional tidak terkait langsung dengan kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lima tahun ke depan adalah :

1. Pendapatan Daerah Jambi yang belum memenuhi target.
2. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama dalam koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari Misi 1 (satu) dari 3 (tiga) Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yakni menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”, maka Tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diambil dari Tujuan 1 (satu) dari 3 (tiga) Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas” dengan demikian Tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) dari 14 (empat belas) sasaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026, yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Dengan demikian sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

2. Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Meningkatnya (Promosi) Seni Budaya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang melayani Publik.

Sasaran 1 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan Indikator Nilai IKM dan Nilai Predikat dan Sasaran 2 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi, dengan Indikator Jumlah Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD, Sasaran 3 Meningkatnya (Promosi) Seni Budaya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang melayani publik dengan Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Anjungan Jambi TMII.

Untuk jelasnya Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 berikut Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Kinerja Tujuan dan sasaran dari tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	IKM (nilai)	-	-	80.354	83.3	84	84	85	85.5	86
			1. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai IKM	80.354	83.3	84	84	85	85.5	86
				2. Predikat AKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
			2. Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD (Rupiah.Miliar)	3.027.980	2.567.000	2.693.000	3.193.000	3.352.650	3.520.282	3.696.296
			3. Meningkatnya (Promosi) Seni Budaya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang Melayani Publik	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Anjungan Jambi TMII (Orang)	2134	3500	3605	7210	7571	7949	8346

Sumber :Bapegdaprov. Jambi . 2021. Data Diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026 maka diperlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun (2021-2026). Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Adapun Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebanyak 5 (lima) Strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan
2. Meningkatkan pembangunan/pengembangan teknologi informasi
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
4. Tersusunnya regulasi tentang pengelolaan mess
5. Membangun kerja sama hubungan antar Kementerian/Lembaga/Swasta lainnya dan Kabupaten /Kota dalam melaksanakan event-event promosi budaya dan kegiatan fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek

5.2. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan kelima Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, maka ada 6 (enam) Arah

Kebijakan yang diambil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN terlatih pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Membangun program pengembangan data dan informasi.
2. Membangun inovasi layanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
3. Tersusunnya reggulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi
4. Meningkatkan pemeliharaan bangunan dan jumlah sarana dan prasaran Badan Penghubung Provinsi sesuai dengan kebutuhan
5. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi.
6. Melakukan koordinasi kerja sama hubungan antar Kementerian/Lembaga/

Swasta lainnya dan Kabupaten /Kota untuk kegiatan fasilitasi dan promosi Seni Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jabodetabek

Mengadakan event-event promosi seni budaya dan produk unggulan

Untuk jelasnya lima Strategi dan tujuh Arah Kebijakan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

VISI		“Terwujudnya Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”	
MISI I		Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung <i>e-government</i> yang terintegrasi	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan 2. Meningkatkan pembangunan/pengembangan teknologi informasi 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN terlatih pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
		4. Tersusunnya regulasi tentang pengelolaan mess	2. Membangun inovasi layanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 3. Tersusunnya reggulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi 4. Meningkatkan pemeliharaan bangunan dan jumlah sarana dan prasaran Badan Penghubung Provinsi sesuai dengan kebutuhan
2. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	2. Meningkatnya pelayanan penghubung Pemerintah Provinsi Jambi	5. Membangun kerja sama hubungan antar Kementerian/Lembaga/Sw asta lainnya dan Kabupaten /Kota dalam melaksanakan event-event promosi budaya dan kegiatan fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek	5. Melakukan koordinasi kerja sama hubungan antar Kementerian/Lemb aga/ Swasta lainnya dan Kabupaten /Kota untuk kegiatan fasilitasi dan promosi Seni Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jabodetabek 6. Mengadakan event-event promosi seni budaya dan produk unggulan

Sumber : Bapedaprov.Jambi.2021.Data Diolah

Strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 5.1 tersebut dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yang pada tahap selanjutnya dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Selaras dengan strategi dan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan /Sub Kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 2.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
 - 2.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
 - 2.1.2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
 - 2.1.3. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
 - 2.1.4. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
 - 2.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

6.2. Pendanaan

Pendanaan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Untuk jelasnya dana yang diperlukan per masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021 – 2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	B	B	15.598.390,809	B	19.919.469.890	B	20.381.040.879	B	22.419.144.967	B	24.661.059.463	BB	27.127.165.410	BB	129.506.271.418	
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan		-	-	15 dokumen	126.500.000	15 dokumen	139.150.000	15 dokumen	153.065.000	15 dokumen	168.371.500	15 dokumen	185.208.650	90 dokumen	772.295.150	
1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		-	-	11 dokumen	82.500.000	11 Dokumen	90.750.000	11 dokumen	99.825.000	11 dokumen	109.807.500	11 dokumen	120.788.250	35 dokumen	503.670.750	Subbag TU
1.1.2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan		-	-	4 dokumen	44.000.000	4 dokumen	48.400.000	4 dokumen	53.240.000	4 dokumen	58.564.000	4 dokumen	64.420.400	20 dokumen	268.624.400	Subbag TU
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan		100 %	8.311.280.080	100 %	9.027.088.088	100 %	9.929.796.897	100 %	10.922.776.586	100 %	12.015.054.245	100 %	13.216.559.670	100 %	63.422.555.566	
1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan		14 Bulan	7.819.875.646	14 bulan	8.601.863.211	14 Bulan	9.462.049.532	14 Bulan	10.408.254.485	14 Bulan	11.449.079.933	14 Bulan	12.593.987.927	14 Bulan	60.335.110.733	Subbag TU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
	(bulan)																
1.2.2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	93.02%	12 bulan	491.404.434	12 bulan	425.225.877	12 bulan	467.747.365	12 bulan	514.522.102	12 bulan	565.974.312	12 bulan	622.571.743	12 bulan	3.087.444.833	Subbag TU
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Miliki Daerah		100 %	198.626.400	100 %	418.489.040	100 %	240.337.944	100 %	264.371.738	100 %	290.808.912	100 %	319.889.803	100 %	1.732.523.838	
1.3.1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung	99.20%	2 Kali	198,626,400	2 Kali	218,489,040	2 Kali	240,337,944	2 Kali	264,371,738	2 Kali	290,808,912	2 Kali	319,889,803	12 Kali	1,532,523,838	Subbid Pengelolaan Mess dan Aset
1.3.2.Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pembayaran Pengurusan IMB Gedung	-	-	-	1 Kali	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	200,000,000	Subbid Pengelolaan Mess dan Aset
1.4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	-	100 %	79,990,000	100 %	87,989,000	100 %	96,787,900	100 %	106,466,690	100 %	117,113,359	100 %	128,824,695	100 %	617,171,644	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
1.4.1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	0%	93 Stel	60,450,000	110 Stel	66,495,000	110 Stel	73,144,500	115 Stel	80,458,950	115 Stel	88,504,845	115 Stel	97,355,330	658 Stel	466,408,625	Subbag TU
1.4.2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	0%	10 Orang	19,540,000	10 Orang	21,494,000	12 Orang	23,643,400	12 Orang	26,007,740	12 Orang	28,608,514	12 Orang	31,469,365	68 Orang	150,763,019	Subbag TU
1.5.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	-	100 %	2,605,777,624	100 %	3,013,515,386	100 %	3,314,866,925	100 %	3,646,353,618	100 %	4,010,988,979	100 %	4,412,087,877	100 %	21,003,590,410	
1.5.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	99.79%	13 Jenis	52,766,100	13 Jenis	58,042,710	13 Jenis	63,846,981	13 Jenis	70,231,679	13 Jenis	77,254,847	13 Jenis	84,980,332	13 Jenis	407,122,649	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.5.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	42.26%	44 Jenis	337,179,910	44 Jenis	370,897,901	44 Jenis	407,987,691	44 Jenis	448,786,460	44 Jenis	493,665,106	44 Jenis	543,031,617	44 Jenis	2,601,548,685	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.5.3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/Tamu	56.13%	30,000 orang/tamu	1,146,832,394	30,000 orang/tamu	1,293,675,633	30,000 orang/tamu	1,423,043,197	30,000 orang/tamu	1,565,347,516	30,000 orang/tamu	1,721,882,268	30,000 orang/tamu	1,894,070,495	51900 Orang/Tamu	9,044,851,503	Subbag TU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
1.5.4.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	-	0%	0	25 Jenis	60,000,000	25 Jenis	66,000,000	25 Jenis	72,600,000	25 Jenis	79,860,000	25 Jenis	87,846,000	125 Jenis	366,306,000	Subbag TU
1.5.5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	100%	2 jenis	44,993,220	2 jenis	49,492,542	2 jenis	54,441,796	2 jenis	59,885,976	2 jenis	65,874,573	2 jenis	72,462,031	2 Jenis	347,150,138	Subbag TU
1.5.6.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	-	0%	0	100 orang/tamu	55,000,000	100 orang/tamu	60,500,000	100 orang/tamu	66,550,000	100 orang/tamu	73,205,000	100 orang/tamu	80,525,500	600 orang/Tamu	335,780,500	Subbag TU
1.5.7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan kunsultasi dalam dan luar daerah	100%	950 Kali	1,024,006,000	950 Kali	1,126,406,600	950 Kali	1,239,047,260	950 Kali	1,362,951,986	950 Kali	1,499,247,185	950 Kali	1,649,171,903	1194 Kali	7,900,830,934	Subbag TU
1.6.Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	0	100%	1,743,500,000	100%	1,302,850,000	100%	1,433,135,000	100%	1,576,448,500	100%	1,734,093,350	100%	7,790,026,850	
1.6.2.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	0	3 Unit	1,650,000,000	2 Unit	1,200,000,000	2 Unit	1,320,000,000	2 Unit	1,452,000,000	2 Unit	1,597,200,000	11 Unit	7,219,200,000	Subbid Pengelola an Mess dan Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
1.6.3.Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	-	-	0	4 jenis	33,000,000	4 jenis	36,300,000	4 jenis	39,930,000	4 jenis	43,923,000	4 jenis	48,315,300	4 Jenis	201,468,300	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.6.4.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	-	-	0	4 Jenis	60,500,000	4 Jenis	66,550,000	4 Jenis	73,205,000	4 Jenis	80,525,500	4 Jenis	88,578,050	4 Jenis	369,358,550	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah		100 %	2,745,622,705	100 %	3,052,344,976	100 %	3,322,203,473	100 %	3,654,423,820	100 %	4,019,866,202	100 %	4,421,852,823	100 %	21,216,313,999	
1.7.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat dan barang keluar daerah	99.71%	21 Kali	44,445,000	21 Kali	48,889,500	21 Kali	53,778,450	21 Kali	59,156,295	21 Kali	65,071,925	21 Kali	71,579,117	5 Tahun	342,920,286	Subbag TU
1.7.2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	86.59%	12 Bulan	1,317,455,670	12 Bulan	1,449,201,237	12 Bulan	1,594,121,361	12 Bulan	1,753,533,497	12 Bulan	1,928,886,846	12 Bulan	2,121,775,531	5 Tahun	10,164,974,142	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.7.3.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian tabung gas	42.26%	7 kali	101,395,008	7 kali	111,534,509	7 kali	122,687,960	7 kali	134,956,756	7 kali	148,452,431	7 kali	163,297,674	5 Tahun	782,324,338	Subbid Pengelola an Mess dan Aset
1.7.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	98.02%	12 Bulan	1,282,327,027	12 Bulan	1,442,719,730	12 Bulan	1,551,615,703	12 Bulan	1,706,777,273	12 Bulan	1,877,455,000	12 Bulan	2,065,200,500	5 Tahun	9,926,095,233	Subbid Pengelola an Mess dan Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
1.8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1,657,094,000	100 %	1,850,043,400	100 %	2,035,047,740	100 %	2,238,552,514	100 %	2,462,407,765	100 %	2,708,648,542	100 %	12,951,793,961	
1.8.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	-	23 Unit	945,988,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,988,000	Subbid Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
1.8.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	99.68%	23 Unit	-	23 Unit	1,067,826,800	23 Unit	1,174,609,480	23 Unit	1,292,070,428	23 Unit	1,421,277,471	23 Unit	1,563,405,218	138 Unit	6,519,189,397	Subbid Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
1.8.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	97.70%	5 unit	175,172,000	5 unit	192,689,200	5 unit	211,958,120	5 unit	233,153,932	5 unit	256,469,325	5 unit	282,116,258	30 Unit	1,351,558,835	Subbid Pengelolaan Mess dan Aset
1.8.4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	97.70%	4 unit	535,934,000	4 unit	589,527,400	4 unit	648,480,140	4 unit	713,328,154	4 unit	784,660,969	4 unit	863,127,066	24 Unit	4,135,057,730	Subbid Pengelolaan Mess dan Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
Lainnya																	
II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan Penghubung yang Optimal		100 %	638,088,084	100 %	2,030,656,892	100 %	2,207,586,582	100 %	2,428,345,240	100 %	2,671,179,764	100 %	2,938,297,740	100 %	12,914,154,302	
2.1.Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan			638,088,084		2,030,656,892		2,207,586,582		2,428,345,240		2,671,179,764		2,938,297,740		12,914,154,302	
2.1.1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Apartur dan Masyarakat	Jumlah periode kegiatan Pelayanan Publik Bagi Apartur dan Masyarakat	-	0	-	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	60,500,000	1 Tahun	66,550,000	1 Tahun	73,205,000	1 Tahun	80,525,500	1tahun	335,780,500	Subbid Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2.1.2.Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Sarasehan dan sosialisasi yang dilaksanakan	99.14%	2 Kali	90,794,000	2 Kali	99,873,400	2 Kali	109,860,740	2 Kali	120,846,814	2 Kali	132,931,495	2 Kali	146,224,645	12 Kali	700,531,094	Subbid Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2.1.3.Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian	Jumlah fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Seni	99.96	20 Kali	547,294,084	20 Kali	625,783,492	20 Kali	662,225,842	20 Kali	728,448,426	20 Kali	801,293,268	20 Kali	881,422,595	120 Kali	4,246,467,707	Subbid Promosi, Informasi dan Seni Budaya

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
			target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	target	Rp jt	
Seni Budaya	Budaya (event)																
2.1.4.Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	0	0	2 Kali	1,200,000,000	2 Kali	1,320,000,000	2 Kali	1,452,000,000	2 Kali	1,597,200,000	2 Kali	1,756,920,000	10 Kali	7,326,120,000	Subbid Promosi, Informasi dan Seni Budaya
2.1.5.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	0	1 Kali	50,000,000	1 Kali	55,000,000	1 Kali	60,500,000	1 Kali	66,550,000	1 Kali	73,205,000	5 Kali	305,255,000	Subbid Promosi, Informasi dan Seni Budaya
				16,236,478,893		21,350,126,782		22,588,627,461		24,847,490,207		27,332,239,227		30,065,463,150		142,420,425,720	
Total : ProgramdanKegiatan			2 Program		2 Program 9 Kegiatan		2 Program 9 Kegiatan		2 Program 9 Kegiatan		2 Program 9 Kegiatan		2 Program 9 Kegiatan		-		

Sumber : Bapegdaprov. Jambi . 2021. Data Diola

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berangkat dari Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja yakni indikator kondisi positif yang ingin diwujudkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Predikat AKIP
3. Jumlah Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Anjungan Jambi TMII

Adapun Target Indikator Kinerja dan Kondisi Akhir pada tahun 2026 yang ingin dicapai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai IKM	80,354	83,3	84	84,5	85	85,5	86
2.	Predikat AKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
3.	Jumlah Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD (Rupiah.Miliar)	3.027.980	2.567.000	2.693.000	3.193.000	3.352.650	3520.282	3.696.296
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Anjungan Jambi TMII (Orang	2134	3500	3605	3713	3824	3939	4057

Sumber : Bapegdaprov. Jambi . 2021. Data Diolah.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	5.Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	1. Nilai IKM	Sesuai dengan hasil survei (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017)	1. Biro Organisasi 2. Badan Penghubung	
		2. Predikat AKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Inspektorat Daerah	
	2.Meningkatnya Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD (Rupiah.Miliar)	Nilai Pendapatan Tahun Berjalan	Sub Bagian Tata Usaha	
	3.Meningkatnya (Promosi) Seni Budaya pada Instansi/Lemba ga Pemerintah Daera yang melayani publik	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Anjungan TMII (Orang)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Berjalan	Sub Bidang Promosi, Informasi dan Seni Budaya	

7.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi,
Tahun 2021–2026

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	Predikat AKIP	-
5.07.01.1.01		1.1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	-	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
5.07.01.1.01.0 1			1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan
5.07.01.1.01.0 7			1.1.2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen pelaporan
5.07.01.1.02		1.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	Persentase terlaksananya administrasi keuangan
5.07.01.1.02.0 1			1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan (bulan)
5.07.01.1.02.0 2			1.2.2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	-	Jumlah Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
			ASN		Barang/Jasa
5.07.01.1.03		1.3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah
5.07.01.1.03.02			1.3.1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung
5.07.01.1.03.06			1.3.2.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Pembayaran Pengurusan IMB Gedung
5.07.01.1.05		1.4.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	-	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah
5.07.01.1.05.02			1.4.1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
5.07.01.1.05.09			1.4.2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
5.07.01.1.06		1.5.Administrasi Umum Perangkat daerah	-	-	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum
5.07.01.1.06.01			1.5.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
			Bangunan Kantor		
5.07.01.1.06.0 2			1.5.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
5.07.01.1.06.0 4			1.5.3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Peserta Rapat/Tamu
5.07.01.1.06.0 5			1.5.4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan
5.07.01.1.06.0 6			1.5.5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Jenis Bahan Bacaan
5.07.01.1.06.0 8			1.5.6.Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Tamu
5.07.01.1.06.0 9			1.5.7.Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah
5.07.01.1.07		1.6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.07.01.1.07.0 2			1.6.1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	-	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
			Lapangan		
5.07.01.1.07.0 5			1.6.2.Pengadaan Mebel	-	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel
5.07.01.1.07.0 6			1.6.3.Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Kantor
5.07.01.1.08		1.7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
5.07.01.1.08.0 1			1.7.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Pengiriman Surat Dan Barang Keluar Daerah
5.07.01.1.08.0 2			1.7.2.Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Periode Pembayaran Rekening
5.07.01.1.08.0 3			1.7.3.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Pengisian Tabung Gas
5.07.01.1.08.0 4			1.7.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor
5.07.01.1.09		1.8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.09.0 1			1.8.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpeliharaan
5.07.01.1.09.0 2			1.8.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
5.07.01.1.09.0 6			1.8.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.07.01.1.09.0 9			1.8.4.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi
5.07.02	2.Program Pelayanan Penghubung	-	-	Persentase Pelayanan yang dilaksanakan	-
5.07.02.1.01		2.1.Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.02.1.01.0 1			2.1.1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	-	Jumlah Periode Kegiatan Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5.07.02.1.01.0 2			2.1.2.Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	-	Jumlah Kegiatan Sarasehan dan Sosialisasi yang Dilaksanakan
5.07.02.1.01.0 3			2.1.3.Peningkatan fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	Jumlah Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Seni Budaya (event)
5.07.02.1.01.0 4			2.1.4.Kegiatan fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.07.02.1.01.0 5			2.1.5.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Sumber: Bapegdaprov. Jambi 2021. Data Diolah.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dibawah koordinasi Bappeda Provinsi Jambi.

Rencana Strategis ini menguraikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang juga merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang strategis guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai tujuan organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) yang akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan ***Jambi MANTAP Tahun 2026.***

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh komponen dalam organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, kerjasama dan koordinasi yang baik sesama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi serta masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.